

## **BAB II**

### **KEBIJAKAN LUAR NEGERI DAN PERKEMBANGAN FEMINISME DI SWEDIA**

Pada bab ini akan membahas tentang kebijakan luar negeri feminis Swedia dan Kampanye *Midwives4all*. Dalam upaya mengetahui bagaimana Kampanye *Midwives4all* bekerja sebagai bagian dari kebijakan luar negeri feminis Swedia di Uganda penting untuk memahami latar belakang mengapa negara Swedia mengeluarkan kebijakan luar negeri feminis. Untuk itu, bab II akan dibagi lagi ke dalam dua subbab yang akan membahas kebijakan luar negeri feminis yang dikeluarkan oleh kabinet Stefan Löfven serta mengenai bagaimana *Midwives4all Campaign* dikeluarkan sebagai strategi dalam mencapai kebijakan luar negeri feminis Swedia di Uganda.

#### **2.1 Kebijakan Luar Negeri Feminis Swedia**

Kerajaan Swedia merupakan salah satu negara Nordik yang terletak diantara Finlandia dan Norwegia. Negara – negara Nordik dikenal baik oleh dunia sebagai negara yang selalu mengedepankan prinsip universalitas dan egaliterisme dalam dunia internasional hingga pemerintahan yang demokratis. Karakteristik lain dari negara kesejahteraan Nordik terlihat dari bagaimana mereka sangat menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia. Layanan publik hingga program-program jaminan sosial merupakan proyek utama yang menjadi fokus pembangunan bangsa. Swedia, layaknya negara Skandinavia lainnya adalah negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kesetaraan gender, karakter yang menjunjung tinggi kesetaraan ini tidak hanya dapat dilihat dalam lingkungan domestik negara Swedia, namun juga dapat dilihat dari kebijakan luar negeri yang dikeluarkan oleh Swedia. Swedia merupakan negara pertama dan satu – satunya di dunia yang secara eksplisit mengeluarkan apa yang disebut dengan ‘kebijakan luar negeri feminis’, menempatkan promosi kesetaraan gender dan hak-hak perempuan di pusat agenda diplomatiknya. (Kroet, 2014).

Keluar sebagai kekuatan utama di Eropa selama abad ke-17, Swedia tidak berpartisipasi dalam perang apa pun selama dua abad, baik perang dunia pertama

maupun kedua. Netralitas merupakan sikap yang sudah diadopsi Swedia selama sekitar 200 tahun. Sikap netralitas ini dimulai sejak tahun 1810 dimana Raja Karl XIV Johan mengubah sikap kebijakan luar negeri Swedia menjadi kebijakan netralitas yang masih bertahan hingga beberapa tahun belakangan ini. (Global Security, 2014). Karakteristik lain yang juga sangat mencolok dari negara Swedia adalah tingginya hasrat dari masyarakat untuk menjunjung tinggi kesetaraan. Negara Swedia yang relatif kecil membuat proses pengambilan keputusan lebih mudah dilakukan dibanding di negara-negara besar. (Kuhnle & Pedersen, 2017). Adanya pergantian partai yang menguasai Swedia setelah pemilihan umum pada September 2014, dimana kini partai yang berkuasa adalah Sosial Demokrat yang dipimpin oleh Perdana Menteri Stefan Löfven merupakan partai didirikan pada tahun 1889, dimana partai ini merupakan partai politik tertua dan terbesar di Swedia dan sudah dipimpin oleh Stefan Löfven sejak 2012. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Sosial Demokrat terutama berfokus pada kebebasan, kesetaraan dan solidaritas. Partai inipun berkoalisi dengan *The Green Party* dalam menjalankan pemerintahan. *The Green Party* merupakan partai yang selalu memfokuskan tujuannya pada masalah lingkungan. Partai ini tidak memiliki pemimpin partai, melainkan memiliki dua juru bicara yang selalu terdiri dari satu pria dan satu wanita. (The Swedish Institute, 2019)

Dalam pernyataannya, Stefan Löfven mengatakan bahwa kesetaraan gender merupakan prioritas pemerintah dalam upaya pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya. Melalui pemerintahan feminis, setiap kebijakan baik itu nasional maupun internasional selalu dirumuskan dengan berdasarkan perspektif gender. Kesetaraan gender merupakan masalah hak asasi manusia dan hak asasi manusia merupakan bagian tak terpisahkan dari demokrasi sehingga hal ini sangat penting untuk dijunjung tinggi. Lebih lanjut, pemerintah Swedia menekankan bahwa kesetaraan gender merupakan solusi dalam menciptakan kesejahteraan dan pembangunan ekonomi. (Ministry for Foreign Affairs Sweden, 2014).

Swedia adalah pemimpin dalam hal memberikan perhatian yang lebih besar kepada perempuan, baik itu di PBB, Uni Eropa maupun OSCE. Langkah mereka inipun kini telah diikuti oleh banyak negara di dunia seperti Australia, Finlandia, Inggris,

Prancis dan Amerika Serikat. Kanada juga merealisasikan dukungannya akan perempuan melalui peluncuran kebijakan bantuan internasional feminis pertama, berjanji untuk mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak perempuan melalui bantuan luar negerinya, dengan pemahaman bahwa hal tersebut “adalah cara terbaik untuk membangun dunia yang lebih damai, lebih inklusif dan lebih makmur.” (Vogelstein, 2019).

Swedia merupakan pemimpin dalam hal memperjuangkan kesetaraan gender, dapat dilihat dari berbagai upaya – upayanya untuk memastikan bahwa perempuan dan laki – laki diperlakukan sama didalam setiap aspek kehidupan, upaya – upayanya antara lain: negara ini menjadi negara pertama yang mengesahkan undang – undang mengenai diskriminasi gender pada tahun 1980. ( The Swedish Institute, 2019). Kemudian Swedia menjadi negara pertama yang memperkenalkan istilah ‘*parental leave*’ alih – alih ‘*maternity leave*’ yaitu pada tahun 1974, hal ini mengarah pada tugas merawat anak tidak hanya dibebankan pada ibu namun juga ayah. Banyaknya investasi domestik yang dilakukan dalam hal kesetaraan gender tampaknya membuahkan hasil bagi kesejahteraan maupun perekonomian Swedia. Menurut riset World Economic Forum, Swedia merupakan negara yang secara konsisten memiliki angka ketimpangan gender yang rendah. Hal ini dibuktikan dengan peringkat *gender gap* Swedia yang selalu menempati lima besar sejak tahun 2006, hal ini dilihat dari indikator kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan politik. Selain itu juga dapat dilihat dari susunan anggota parlemen Swedia dimana jumlah anggota parlemen kini terus meningkat sejak kebijakan luar negeri feminis dikeluarkan, pada tahun 2014 jumlah partisipasi perempuan di parlemen Swedia hampir mencapai setengah dari keseluruhan jumlah parlemen, yaitu terdiri dari 154 orang dari 349, dan jumlah perempuan dalam parlemen meningkat pemilihan selanjutnya yaitu terdiri dari 161 orang dari keseluruhan anggota parlemen. (The Local Sweden, 2018). Adanya kebijakan feminis ini sebagai komitmen lebih lanjut pemerintah Swedia untuk memastikan bahwa kebijakan nasional dan alokasi anggaran berkontribusi pada kesetaraan gender dan bahwa pembangunan dan bantuan kemanusiaan menaruh perhatian yang lebih besar terhadap kesetaraan gender di semua bidang.

Kebijakan ini juga sejalan dengan Deklarasi Beijing dan pembentukan Agenda Pembangunan 2030. Melalui kebijakan ini Swedia ingin mengambil tindakan yang lebih berkomitmen untuk melibatkan perempuan dalam proses perdamaian dan keamanan. Inisiatif ini merupakan suatu strategi untuk meningkatkan partisipasi perempuan di semua bidang yang vital bagi keberhasilan tujuan pembangunan berkelanjutan. Kesetaraan gender merupakan alat dan juga tujuan dari kebijakan luar negeri feminis ini. Dalam the Global Leaders' Meeting yang diadakan pada 27 September 2015, Perdana Menteri Stefan Löfven mengatakan kesetaraan gender merupakan masalah hak asasi manusia dan hal ini merupakan strategi ekonomi yang cerdas, karena dengan memberikan peluang yang sama dengan perempuan yang merupakan setengah populasi dunia berpotensi untuk mewujudkan kemakmuran dunia. (UN Women, 2015). Swedia merupakan satu-satunya negara yang memiliki harmonisasi kesetaraan gender dalam kebijakan dalam dan luar negeri. Dalam kerangka dari kebijakan luar negeri feminis ini dijelaskan bahwa kebijakan luar negeri feminis mencakup: kebijakan luar negeri dan keamanan, kerja sama pembangunan dan kebijakan perdagangan.

Salah satu tujuan menyeluruh dari kebijakan luar negeri feminis yang tertulis dalam Handbook on Feminist Foreign Policy adalah untuk menangkal semua diskriminasi dan mempromosikan ketidaksetaraan gender dalam semua tahapan dan konteks kehidupan. Buku pegangan ini juga mendeskripsikan bagaimana kebijakan luar negeri feminis Swedia menjadikan tiga R berdasarkan R yang keempat sebagai landasan dari kebijakan ini. R yang pertama yaitu *Right*, yaitu promosi penikmatan penuh semua hak perempuan dan anak perempuan sebagai hak asasi manusia, termasuk dengan memerangi semua bentuk kekerasan dan diskriminasi yang membatasi kebebasan mereka untuk bertindak. R yang kedua yaitu *Representation*, yaitu promosi terhadap partisipasi dan pengaruh perempuan dalam proses pengambilan keputusan di semua tingkatan dan di semua bidang, termasuk pembangunan dialog dengan perwakilan perempuan di semua tingkatan termasuk dalam masyarakat sipil. Kemudian R yang terakhir merupakan *Resources*, yaitu berusaha untuk memastikan bahwa sumber daya dialokasikan untuk mempromosikan kesetaraan gender dan kesempatan yang setara bagi semua perempuan dan anak perempuan untuk menikmati hak asasi manusia. Ketiga R

tersebut nantinya dilaksanakan berdasarkan *Reality*, yaitu keadaan sebenarnya dari sasaran setiap kebijakan. (Ministry for Foreign Affairs, 2018). Resolusi Keamanan PBB 1325 (UNSCR) tahun 2000 tentang Perempuan, Perdamaian dan Keamanan pada bulan Oktober dan pembentukan agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) merupakan dasar bagi Swedia yang merasa sudah saatnya untuk menentukan prioritas yang lebih matang bagi gerakan feminis global.

## **2.2 Midwives4all Campaign**

*“Uganda will do all that is necessary to work with you [midwives4all] to ensure that this campaign is successful in hastening the reduction in levels of maternal and new-born mortality in Uganda”* ( The First Lady of Uganda, 2015). Kampanye Midwives4all merupakan kampanye yang dilaksanakan oleh pemerintah Swedia sebagai respon atas buruknya kondisi kesehatan ibu dan anak di Uganda. Hal ini juga sejalan dengan apa yang menjadi Strategi Hasil Kerja Sama Swedia dengan Uganda 2014–2018. Berkaitan dengan hal ini pemerintah Swedia menganggarkan dana sebanyak SEK 1350 juta melalui the Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA) untuk pembiayaan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam mengejar kebijakan luar negeri feminis Swedia di Uganda. Strategi – strategi tersebut dirancang untuk mencapai tujuan dari kebijakan luar negeri Swedia yaitu berkontribusi dalam memperkuat penghormatan terhadap hak asasi manusia di Uganda dan meningkatkan peluang bekerja populasi lokal, meningkatkan kualitas kesehatan dan bebas dari kekerasan. (Ministry for Foreign Affairs Sweden, 2014). Kegiatan-kegiatan di bawah strategi ini diharapkan dapat berkontribusi pada pencapaian sub-sasaran 1, 2, 4 dan 5 dalam kerangka kebijakan bantuan pemerintah. Hasil – hasil yang diharapkan dalam kerangka kerja strategis tersebut antara lain: Memperkuat demokrasi dan kesetaraan gender, penghormatan terhadap HAM, kebebasan dari penindasan, peluang pekerjaan yang lebih baik, pertumbuhan ekonomi hingga pendidikan yang lebih baik. (MFA Sweden, 2014)

Pemilihan Kampanye Midwives4all dilakukan di Uganda sendiri dikarenakan kurangnya akses terhadap bidan di negara ini dibandingkan dengan jumlah kelahiran

yang terdapat di Uganda, terutama di daerah-daerah yang sulit dijangkau. Oleh karena itu Swedia ingin memberikan pelatihan terhadap bidan – bidan yang terdapat di Uganda karena melihat adanya kelemahan dalam kualitas pedagogis pendidikan kebidanan di Uganda. Karena menurut Survei Demografi dan Kesehatan Uganda (UDHS), hampir setengah dari angka ibu melahirkan di Uganda hanya dibantu oleh dukun terlatih dalam proses kelahiran. Angka mortalitas ibu pada saat melahirkan sangatlah tinggi di Uganda. Berdasarkan data dari UNFPA pada tahun 2017, rasio kematian ibu dalam lima tahun terakhir 24% dari 438 hingga 336 per 100.000 kelahiran hidup. Jumlah bidan yang diperlukan di fasilitas kesehatan publik di Uganda adalah sebanyak 6.061, namun hanya terdapat 76% (4.607) dari posisi yang harusnya diisi, persebarannya juga kurang merata. Tampaknya indikator tersebut masih mengalami stagnasi selama beberapa dekade terakhir. Angka mortalitas ibu pada saat melahirkan ini dapat berkurang secara signifikan dengan meningkatkan akses ke perawatan kebidanan serta fasilitas kesehatan. Oleh karena itu disini pemerintah Swedia bekerja dengan UNFPA dalam membantu mengatasi masalah ini. (UNFPA, 2017)

### **Gambar 2. 1**

The First Lady, Mrs Janet Museveni, dalam peluncuran Kampanye Midwives4all



Sumber: Embassy of Sweden in Kampala

Dalam peluncuran Kampanye Midwives4all, The First Lady of Uganda memuji pemerintah Swedia dalam usahanya untuk membangun kesadaran akan pentingnya peran bidan dalam mengurangi angka mortalitas ibu pada saat melahirkan.

*"As you know the cause of maternal and child health has become the most challenging topic in our health sector. Therefore, the midwives4all campaign, whose objective is to fast-track and increase the number of midwives in Uganda and the whole world, is right. It is timely and must be saluted," (Mrs. Museveni, 2015)*

Kampanye ini dilaksanakan pada 23 Februari 2015 hingga 1 Januari 2016 dengan mempromosikan tiga pesan utama. Melalui tiga pesan utama yang ingin dipromosikan dalam kampanye ini, kampanye ini dilaksanakan untuk mempengaruhi pembuat kebijakan, memobilisasi komunitas, dan menarik kaum muda agar berprofesi dalam bidang kebidanan. Kampanye ini pun secara aktif didukung oleh Ibu Negara Uganda, Janet Museveni. Selain Ibu Negara Uganda, kampanye ini juga merangkul beberapa tokoh penting lainnya dalam pelaksanaan kampanye ini mulai dari Menteri Kesehatan Uganda, pemimpin agama, pemimpin redaksi, atlet, hingga penyanyi terkenal Uganda. (New Vision, 2015). Kampanye ini dalam pelaksanaannya memiliki tiga kunci yang akan dipromosikan, antara lain:

- 1) In Uganda, 20 women die every day from giving birth. Midwives can save these lives*
- 2) Men play an important role in supporting their wives, sisters and daughters to deliver safely*
- 3) Midwifery – career of choice for young people.*

Ketiga pesan kampanye diatas dirancang oleh Kedutaan Besar Swedia di Uganda sebagai konteks dari Midwives4all Campaign dalam mengatasi tantangan yang diperoleh dari dalam analisis situasi sebelumnya. Kampanye ini juga berjuang untuk memperbaiki reputasi profesi bidan yang selama ini dipandang negatif oleh masyarakat. (Ministry for Foreign Affairs Sweden, 2014). Layaknya di negara – negara Afrika lainnya, bidan merupakan salah satu profesi yang sangat penting dimana profesi ini bukan hanya dapat menyelamatkan nyawa ibu dan anak, melainkan dapat mendukung dan mempromosikan keluarga yang sehat, serta memberdayakan perempuan. Indikator kesehatan ibu dan anak Uganda merupakan termasuk salah satu yang terburuk di dunia, keadaan inilah yang membuat pemerintah Swedia mengeluarkan kampanye ini sebagai salah satu strategi dalam membantu Uganda. (Ministry of Health Government of Uganda, 2008)

Melalui kampanye ini Kementerian Luar Negeri Swedia ingin mengintensifkan upayanya dalam diplomasi digital dan publik. Satu dari enam tujuan eksternal dari kebijakan feminis Swedia merupakan peningkatan terhadap *reproductive health and rights* (SRHR), hak – hak tersebut merupakan hak – hak dasar yang harus dimiliki setiap orang dan sangat penting bagi kesehatan dan kondisi kehidupan perempuan dan anak perempuan, termasuk di dalamnya hak untuk memutuskan tubuh mereka sendiri. Adanya ketidaksetaraan gender pun terus menghambat kesehatan ibu di Uganda karena adanya norma-norma gender tradisional yang cenderung mengistimewakan kesejahteraan pria dan anak laki-laki dengan mengorbankan perempuan dan anak perempuan. Kurangnya keterlibatan suami mengakibatkan setiap ibu harus berjuang sendiri selama proses kehamilan. Salah satu contoh norma tersebut adalah dimana para seringkali ibu tidak difasilitasi sarana transportasi ke fasilitas kesehatan, sehingga sebagian besar proses persalinan terpaksa dilakukan tanpa kehadiran tenaga terampil.

Swedia sebagai negara yang sudah lama bekerja dengan UNFPA dalam membantu Uganda untuk meningkatkan kualitas kesehatan di Uganda pun hadir dengan strategi baru untuk membangun kesadaran akan isu yang vital ini. *Midwives4all Campaign* dibuat untuk dapat berkontribusi pada kesetaraan gender di Uganda dengan mempromosikan pentingnya menjamin akses perempuan terhadap sumber daya produktif. Akses ini termasuk akses terhadap pendidikan dan kesehatan. Namun dalam mencapai kebijakan luar negeri feminis ini Swedia tentunya mengalami beberapa tantangan yang dapat menghambat tercapainya kebijakan luar negeri Swedia tersebut, korupsi yang merajalela merupakan hambatan serius bagi pembangunan, kemudian diikuti dengan dampak serius yang terjadi setelah konflik bersenjata sebelumnya juga semakin memperparah situasi di Uganda. Hambatan tersebut pada akhirnya membawa Swedia pada keputusan untuk bekerja-sama dengan pihak lain selain pemerintah Uganda, yaitu dengan mitra non –negara. (New Vision, 2015)

### **2.2.1. Aplikasi Diplomasi Digital**

Kedutaan besar Swedia dan MFA melihat kampanye ini merupakan salah satu keberhasilan dalam diplomasi digital mereka, terutama ketika menyangkut upaya yang dilakukan untuk menciptakan advokasi. Inisiatif dalam menyebarkan pengaruh ini

menunjukkan betapa Kementerian Luar Negeri Swedia sangat berkomitmen untuk mencapai apa yang menjadi kebijakan luar negeri feminis mereka melalui diplomasi digital. Tercapainya kebijakan luar negeri feminis Swedia di Uganda merupakan kesuksesan dari implementasi diplomasi digital pada Kampanye *Midwives4all*. Walaupun kampanye ini tidak hanya dilakukan secara digital, peran dari pemberitaan melalui media sosial, televisi, dan *platform* lainnya sangat dominan sehingga dapat mempengaruhi para pembuat kebijakan di Uganda, jurnalis, blogger, youtuber, hingga *First Lady of Uganda* untuk *concern* terhadap keadaan ‘midwifery’ di Uganda. Para aktor digital tidak mungkin lagi menghindari era digital, cara-cara komunikasi baru telah mengubah cara para diplomat melaksanakan kebijakan luar negeri. (Hoffman, *Twitter as an Instrument of Public Diplomacy: A Case Study of Sweden and Germany*, 2013). Melalui kampanye yang berbasis instrumen digital ini Swedia berhasil mempengaruhi negara lain, dalam hal ini Uganda, untuk mengadopsi apa yang sudah ditransfer oleh Swedia.

Jika dilacak kembali, pada tahun 2013, Menteri Luar Negeri Swedia, Carl Bildt dalam pernyataannya menegaskan bahwa Kementerian Luar Negeri Swedia akan terus memodernisasi layanan luar negeri mereka dengan alasan bahwa media digital merupakan salah satu instrumen penting dalam diplomasi publik maupun digital, dia pun menjelaskan bahwa kini setiap kedutaan besar Swedia di luar negeri sudah memiliki akun di beberapa *platform* media sosial yang paling banyak digunakan saat itu, yaitu Facebook dan Twitter. Menurut Carl, menjadi pembelajar yang cepat dalam teknologi informasi merupakan sesuatu yang mutlak yang harus dimiliki setiap negara di era globalisasi ini. Jon Pelling, sebagai Penasihat Khusus untuk Komunikasi Strategis di Kementerian Luar Negeri Swedia merupakan salah satu tokoh yang bertugas mengembangkan cara – cara inovatif yang menyangkut diplomasi digital. Berawal dari pernyataan Carl Bildt tersebut, Swedia pun mulai menginisiasi proyek – proyek yang berkaitan dengan implementasi teknologi dalam ranah politik. Salah satu agenda dari pengembangan proyek ini yaitu meningkatkan kebebasan berbicara melalui media berbasis digital. Salah satu karya yang dihasilkan Swedia yaitu *Diphohack Stockholm*, yang merupakan hasil kolaborasi dengan Kedutaan Besar Belanda di Stockholm, proyek

berbasis online ini dipercayai akan membawa perubahan yang berkelanjutan dan transparansi dalam sektor sosial di Uni Eropa. Melalui pengalaman yang diperoleh dari Diplohack, tim komunikasi Kementerian Luar Negeri Swedia akhirnya memprakarsai sebuah kampanye yang memiliki fokus untuk menciptakan advokasi akan pentingnya peran bidan dalam memenuhi kebutuhan dasar baik ibu maupun bayi di seluruh dunia. Isu inipun diangkat karena sebagai negara yang sangat giat dalam mempromosikan kesetaraan gender Swedia ingin meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya peran bidan dalam pemenuhan terhadap hak kesehatan seksual dan reproduksi. (Pelling, 2016)

Terpenuhinya hak kesehatan seksual dan reproduksi akan berkontribusi pada tercapainya target dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dirumuskan pada pertemuan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada bulan September 2015, negara-negara anggota PBB kini mengadopsi agenda pembangunan global selama 15 tahun ke depan, yang merupakan sebuah rencana aksi untuk “manusia, planet, dan kemakmuran” yang dinamakan *The Sustainable Development Goals (SDG)*. SDG bisa dikatakan ambisius jika dilihat dari target dan cakupannya, agenda ini terdiri dari 17 tujuan dan 169 target yang berlaku untuk semua negara, baik negara maju maupun berkembang dengan memperhitungkan tantangan ekonomi, sosial dan lingkungan dunia. Tujuan – tujuan tersebut berbeda dengan dari Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) yang merupakan agenda sebelumnya, tujuan – tujuan dalam SDG berfokus tidak hanya pada pemenuhan kebutuhan negara berkembang melainkan berfokus pada pembangunan berkelanjutan yaitu, *“Development that meets the needs of the present without reducing the ability of future generations to meet their own needs.”* (Galati, 2015). Pendekatan ini melibatkan semua sektor dalam masyarakat diantaranya mengakhiri kelaparan, mempromosikan akses ke sumber energi yang efisien, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja, meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan, hingga mencapai kesetaraan gender.

Berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan ini, hak terhadap pemenuhan kesehatan seksual dan reproduksi diatur dalam *Goal 3*, agenda ini menargetkan pengurangan terhadap rasio angka kematian ibu menjadi kurang dari 70 per 100.000

kelahiran pada tahun 2030. Pemenuhan akan hak tersebut merupakan salah satu dari enam tujuan eksternal dari kebijakan luar negeri feminis Swedia. Kampanye inipun berkolaborasi dengan The Lancet yang akan membantu pemerintah Swedia dalam menyediakan informasi mengenai kebidanan yang akan dipromosikan melalui kampanye ini. (Sweden Ministry for Foreign Affairs, 2015)

Midwives4all merupakan kampanye yang dibentuk di London melalui kolaborasi antara tim The Lancet, The London School of Hygiene and Tropical Medicine, Badan Kerjasama Pembangunan Internasional Swedia, Konfederasi Bidan Internasional dan beberapa pihak lainnya yang turut berpartisipasi. Kampanye ini mendapat dukungan diantaranya dari Sekretaris Jenderal PBB Mr Kofi Annan, UN Women, dan Dr Babatunde Osotimehin yang merupakan Direktur Eksekutif UNFPA. Adanya kesetaraan gender merupakan cara sekaligus tujuan dari tujuan berkelanjutan itu sendiri. (UN Women, 2015). Dalam kampanye ini strategi yang diterapkan merupakan strategi *multitrack*, yaitu dengan melibatkan media berbasis digital. Media sosial merupakan ekosistem potensial yang menjadi strategi baru dalam usaha pencapaian kebijakan luar negeri suatu negara. Kampanye ini diluncurkan secara resmi pada tanggal 23 Februari 2015 di Jenewa, peluncuran kampanye ini ditandai dengan peluncuran tagar *#midwives4all* sebagai tagar resmi dari kampanye ini, setiap kontenpun mulai dikirimkan melalui media sosial dari kampanye ini untuk menciptakan dialog dan diskusi mengenai isu yang ingin diviralkan melalui tagar ini. (Pelling, 2016)

Kampanye inipun dirancang di Uganda dengan strategi yang diharapkan dapat menjangkau kaum muda serta menciptakan diskusi serta membangun kesadaran di masyarakat Uganda. Penggunaan media massa dan media *online* pun dilakukan secara intens untuk menciptakan dialog, serta penyelenggaraan *event* yang dapat merangkul kaum muda di Uganda. Berbagai media sosial yang digunakan antara lain Facebook, Twitter, dan YouTube. Sedangkan media massa yang digunakan yaitu TV, radio dan media cetak. Untuk memastikan informasi yang disebarakan tersebut benar, berkualitas, serta sesuai dengan dimaksudkan dalam kampanye ini, pemerintah Swedia menyelenggarakan pelatihan bagi para jurnalis – jurnalis yang ditugaskan dalam

kampanye ini. Seminar pun diadakan bagi para YouTuber yang juga dirangkul dalam proses kampanye ini dengan berkolaborasi dengan RAHU. (Kato, 2015)

Artikel yang disajikan pun disediakan oleh The Lancet yang berfokus untuk memberikan pemahaman bahwa dengan meningkatkan kualitas tenaga kerja bidan dapat mencegah hampir dua pertiga kematian ibu dan bayi. Laporan mengenai kebidanan juga diperoleh dari UNFPA, WHO hingga Konfederasi Bidan Internasional. Kolaborasi ini dilakukan sebagai upaya signifikan dalam membangun kesadaran bahwa dengan berinvestasi dalam kebidanan dapat mengurangi angka mortalitas ibu pada saat melahirkan, meningkatkan kualitas kehidupan serta memberdayakan perempuan karena melalui hal – hal tersebutlah pembangunan berkelanjutan dapat tercapai.

## Gambar 2. 2

### ***Tweet dari Kofi Annan, yang mendukung Kampanye Midwives4all***



Sumber: *Screenshot* dari akun Twitter Kofi Annan, diunggah 25 September 2015

## Gambar 2. 3

### ***Tweet Kementerian Luar Negeri Swedia***



Sumber: *Screenshot* dari akun Twitter Kementerian Luar Negeri Swedia, diunggah 15 Juni 2017

Penggunaan media sosial merupakan cara inovatif untuk menjangkau ribuan audiens dengan efektif, media sosial juga dapat dijadikan *platform* bagi pemuda Uganda untuk dapat berkontribusi dalam kampanye ini dengan membangun dan merespon dialog yang menghubungkan masyarakat Uganda tidak hanya dengan Kedutaan Besar

Swedia di Uganda tetapi juga dengan Kementerian Luar Negeri Swedia di Stockholm. Dengan berinvestasi dan membangun kesadaran pada kaum muda tersebut, Uganda memiliki duta yang akan terus berbicara untuk memperjuangkan kesehatan ibu dan anak di Uganda. Dengan melakukan hal tersebut, kampanye telah mencapai tujuannya untuk menjadi katalisator untuk debat lanjutan tentang kesehatan ibu dan kebidanan di Uganda.

**Gambar 2. 4 Tweet UN Women**



Sumber: *Screenshot* dari akun Twitter UN Women, diunggah 25 Februari 2015

**Gambar 2. 5 Tweet UNFPA**



Sumber: *Screenshot* dari akun Twitter UNFPA, diunggah 29 Juli 2015